

**PENGARUH IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL DAN PENGAWASAN
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, DINAS KEHUTANAN, DAN DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Dito Aditia Darma Nst, SE., M.Si

Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif/hubungan. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 35 responden yang berlatar belakang pendidikan akuntansi, dengan teknik pengambilan sampel yaitu nonprobability sampling dengan teknik sampling jenuh. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dan dianalisis dengan uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, dan uji hipotesis dengan program IBM SPSS versi 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (X1) dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X2) berpengaruh positif dan signifikan baik secara simultan dan parsial terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Hal ini ditunjukkan dengan hasil yang didapatkan dari uji parsial untuk variabel X1 dengan nilai $2,326 > 2,037$ dengan signifikansi $0,027 < 0,05$ dan variabel X2 dengan nilai $4,946 > 2,037$ dengan signifikansi $0,000 < 0,05$ serta hasil dari uji simultan dengan nilai $29,506 > 3,285$ dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Berarti, jika Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan meningkat maka dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kata Kunci : Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Terbitnya aturan tentang Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP sebagai amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengisyaratkan kebijakan reformasi keuangan negara/daerah dalam rangka mewujudkan *good governance* pada pemerintah pusat maupun daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap negara menginginkan pemerintahan yang dapat berupaya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan *good governance*. Salah satu prinsip strategis yang perlu dan harus dikembangkan

saat ini adalah prinsip tata kelola keuangan. Untuk menciptakan prinsip tata kelola keuangan yang baik diperlukan penguatan sistem dan kelembagaan dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan serta standar penyajian laporan keuangan yang berlaku.

Prinsip tata kelola keuangan yang baik akan mempengaruhi kinerja pemerintah yang menyajikan atau yang membuat laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan yang baik didasarkan pada kinerja akuntabilitas yang menyampaikan serta membuat laporan keuangan tersebut. “Berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu berupa Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab (Pamungkas, 2012)”.

Implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang baik oleh instansi pemerintah dan pengawasan yang maksimal dari pihak internal maupun eksternal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah diharapkan akan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan – urusan pemerintahan dapat lebih optimal. peningkatan terhadap kualitas akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah diharapkan akan berimplikasi pada minimnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga diharapkan *good governance* dapat terwujud baik ditingkat pemerintah pusat maupun daerah.

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 yang dikutip dari laman <http://www.sumutprov.go.id> masih banyak ditemukan indikator kinerja yang belum tercapai atau yang belum mencapai target yang ditargetkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Beberapa OPD dengan indikator kinerja yang masih belum mencapai target yang ditargetkan diantaranya yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Berkaitan dengan fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Provinsi Sumatera Utara”, guna mendapatkan hasil penelitian yang dapat membantu pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara pada khususnya dan pemerintah daerah diluar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada umumnya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah sehingga mampu mendorong terwujudnya *good governance* pada tingkat pemerintah daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan secara parsial berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan secara Simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Provinsi Sumatera Utara?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara parsial pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara simultan pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Surat Keputusan (SK) Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: “Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik”.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasarkan pengertian tersebut, maka semua instansi pemerintah, badan dan lembaga negara baik pada pemerintah pusat maupun daerah wajib memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan tugas pokok masing-masing serta akuntabilitas yang diminta harus meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah serta melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- b. Harus mempunyai suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- e. Harus jujur, objektif, transparan dan aktif sebagai bentuk perubahan manajemen instansi pemerintah dalam pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Akuntabilitas dibedakan dalam beberapa tipe. Menurut Rosjidi (2001) tipe dan jenis akuntabilitas dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu :

- a. Akuntabilitas internal, yaitu setiap pejabat atau pengurus publik baik individu maupun kelompok di dalam lingkungan internal pemerintahan yang secara hirarki berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan secara baik mengenai perkembangan kinerja.
- b. Akuntabilitas eksternal, yaitu setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

Dalam Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 disebutkan bahwa: “Tujuan dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk tercapainya pemerintahan yang baik”. Maka, berdasarkan Inpres tersebut dapat uraikan bahwa tujuan dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah sebagai berikut :

- a. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
- c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

2. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang berlaku menurut peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dibentuklah sebuah standar akuntansi pemerintahan yang kredibel melalui PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. “Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan diyakini akan berdampak kepada peningkatan kualitas laporan keuangan pada pemerintah pusat dan daerah yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel (Nordriawan, 2008)” karena standarisasi akuntansi pemerintahannya berbasis akrual.

Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standar akuntansi (Bastian, 2010), yaitu :

- a. Standar memberikan pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan, kinerja dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi.
- b. Standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secara hati-hati dan independen saat menggunakan keahlian dan integritasnya dalam mengaudit laporan suatu organisasi serta saat membuktikan kewajaran.
- c. Standar memberikan petunjuk tentang data yang perlu disajikan yang berkaitan dengan berbagai variabel yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, perencanaan dan regulasi ekonomi untuk peningkatan efisiensi ekonomi, serta tujuan sosial lainnya.
- d. Standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi.

Berdasarkan teori yang dijelaskan sebelumnya, maka tujuan implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat suatu keputusan ekonomi, politik, dan sosial.

3. Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan

Secara umum, pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah ditetapkan. Menurut Nordiawan (2008) jenis pengawasan laporan keuangan negara meliputi dua hal, yaitu :

- a. Pengawasan internal, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dari lingkungan internal organisasi pemerintah.
- b. Pengawasan eksternal adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang keseluruhannya berasal dari luar lingkungan organisasi pemerintah yang tupoksinya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

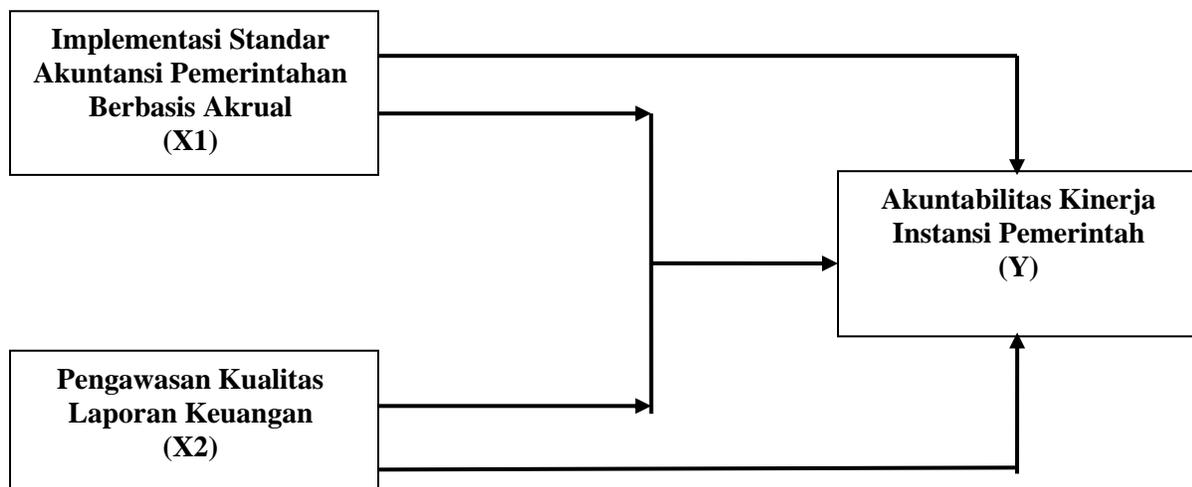
Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Agar dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, laporan keuangan pemerintah harus memenuhi setidaknya empat karakteristik sebagai berikut :

- a. Relevan.
- b. Andal.
- c. Dapat dibandingkan.
- d. Dapat dipahami.

B. KERANGKA KONSEPTUAL

“Kerangka konseptual merupakan penjelasan sementara gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan tentang hubungan antar variabel yakni variabel bebas (independen) dengan variabel terikat (dependen) yang disusun dari berbagai teori yang telah diuraikan (Sugiyono, 2007)”.

Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah penelitian, maka kerangka konseptual yang digunakan dapat digambarkan pada gambar 2.1 sebagai berikut :



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kausal. Pendekatan kausal adalah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antar variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti (Sugiyono, 2014).

Dalam penelitian ini, peneliti ingin menganalisis pengaruh variabel independen yaitu Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap variabel dependen yaitu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

B. Defenisi Operasional Variabel

1. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI (X1)

Suatu tindakan yang dilakukan untuk memastikan standar yang ditetapkan dalam hal ini adalah standar akuntansi pemerintah berbasis akruaI telah terealisasi dengan baik dan memastikan semua pihak telah bekerja sesuai standar yang ditetapkan.

2. Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X2)

Segala tindakan yang digunakan untuk menjamin agar pengumpulan penerimaan - penerimaan negara dan penyaluran pengeluaran – pengeluaran negara tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan di dalam anggaran.

3. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai bagian akuntansi/keuangan yang bekerja di Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan secara sensus, dimana seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *nonprobability sampling*, dengan “sampel jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2014).

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data secara primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan kuesioner. Sedangkan teknik pengumpulan data secara sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode studi pustaka (*library research*). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil kuesioner yang diisi oleh responden mengenai implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI, pengawasan kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berupa data para pegawai bagian akuntansi/keuangan sebagai subjek dalam penelitian ini, data jumlah pegawai di dinas tersebut, serta data laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2017.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik dengan uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Kemudian dengan uji korelasi, uji hipotesis dengan uji parsial dan uji simultan serta yang terakhir dengan metode analisis regresi linear berganda dengan bantuan program IBM SPSS versi 22. Sebelum dilakukan pengukuran data, data ordinal tersebut terlebih dahulu diubah menjadi data interval yang disebut dengan metode suksesif interval (*method of successive interval*).

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4.1. Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Min.	Max.	Mean	Std. Dev	Var
Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik	35	15.008	26.444	20.33534	3.042426	9.256
Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan	35	7.963	26.348	18.93177	3.634187	13.207
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	35	11.931	37.395	26.59986	5.357241	28.700
Valid N (listwise)	35					

Sumber : Data diolah melalui IBM SPSS 22

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel X1 mempunyai hasil minimum sebesar 15,01; maksimum sebesar 26,44; rata - rata (*mean*) sebesar 20,33; standar deviasi (simpangan baku) sebesar 3,04; dan *variance* sebesar 9,26. Dari variabel X2 mempunyai hasil minimum sebesar 7,96; maksimum sebesar 26,35; rata-rata (*mean*) sebesar 18,93; standar deviasi (simpangan baku) sebesar 8,63; dan *variance* sebesar 13,21. Dari variabel Y mempunyai hasil minimum sebesar 11,39; maksimum sebesar 37,39; rata - rata (*mean*) sebesar 26,60; standar deviasi (simpangan baku) sebesar 5,36; dan *variance* sebesar 28,70.

Berikut ini hasil pengubahan data ordinal menjadi data interval dengan metode suksesif interval (*method of successive interval*) :

Tabel 4.2. Hasil Interval
Successive Interval (Total Score)

X1	X2	Y
20.712	20.647	37.101
26.444	26.348	37.395
17.927	19.144	20.844
16.632	19.144	28.917
23.610	17.797	25.903
18.064	17.797	25.903
16.632	15.025	17.738
20.367	19.231	26.259
23.694	16.393	23.206
21.078	16.393	23.206

16.347	7.963	17.625
25.148	12.440	23.843
19.868	17.954	28.693
19.228	17.771	27.345
18.367	19.394	25.726
22.389	19.207	28.562
22.317	19.145	30.879
22.389	20.626	24.726
26.444	26.348	36.218
23.648	19.144	25.903
21.396	17.664	28.886
21.245	21.863	26.254
20.702	21.964	26.490
19.146	19.252	24.349
20.907	22.220	28.641
19.657	19.222	27.447
19.721	20.595	27.285
19.330	20.579	28.627
18.679	17.818	28.896
25.151	26.271	35.667
16.503	17.797	25.903
15.008	15.668	21.566
20.760	22.420	31.375
15.761	14.975	11.931
16.430	16.393	21.686

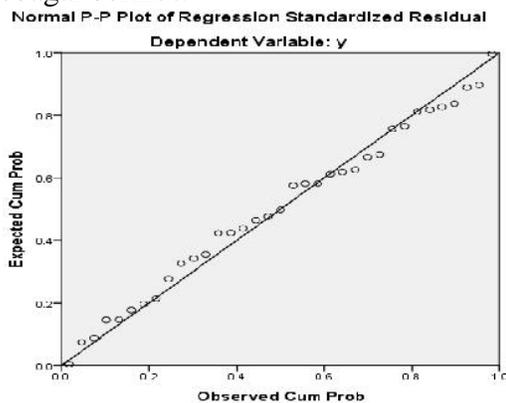
B. Uji Validitas dan Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji validitas seluruh butir pertanyaan penelitian ini dinyatakan valid. Demikian halnya juga dengan uji reliabilitas yang menyatakan bahwa instrumen variabel pada penelitian ini reliabel.

C. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi antara variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi normal atau tidak (Nasution, 2016). Hasil uji normalitas adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1. Grafik PP-Plot

Hasil Pengujian grafik PP-Plot menunjukkan data residual berdistribusi normal, dimana titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal serta penyebaran tidak menjauh dari garis diagonal.

2. Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3. Hasil Uji Multikolinearitas

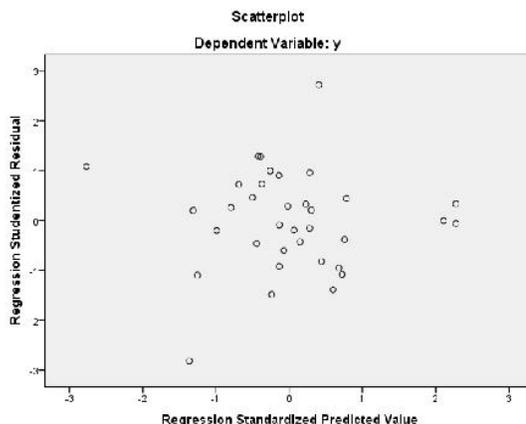
Model	Unstandardized Coefficients		Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Tolerance	VIF
1 (Constant)	-.844	3.947		
X1	.508	.218	.714	1.400
X2	.904	.183	.714	1.400

a. Dependent Variable: y

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, dapat dilihat bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF > 10 dan nilai *tolerance* < 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:



Gambar 4.2. Grafik *Scatterplot*

Grafik *Scatterplot* menunjukkan, penyebaran titik-titik data menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, titik-titik tidak mengumpul di atas atau di bawah, dan tidak membentuk pola tertentu sehingga dapat menunjukkan di dalam model tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Tabel 4.4. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.805 ^a	.648	.626	3.274397	1.917

- a. Predictors : (Constant), Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan
 b. Dependent Variable : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

DW	dL	dU	4-dL	4-dU
1,917	1,343	1,584	2,657	2,416

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai dU dan dL yang diperoleh dari tabel statistik Durbin-Watson, dengan $n=35$, dan $k=2$, maka didapat didapatkan nilai $dL=1,343$ dan $dU=1,584$. Jadi, nilai $4-dU=2,416$ dan nilai $4-dL=2,657$.

Dari output tabel *Model Summary* diatas didapatkan nilai Durbin-Watson adalah sebesar 1,917. Karena nilai DW terletak antara dU dan 4-dU ($1,584 < 1,917 < 2,657$) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi.

D. Uji Hipotesis

1. Uji t

Hasil uji t dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5. Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	UC		SC	t	Sig.
	B	Std. e	Beta		
1 (Constant)	-.844	3.947		-.214	.832
X1	.508	.218	.288	2.326	.027
X2	.904	.183	.613	4.946	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil dari tabel uji t diatas, dapat disimpulkan bahwa variabel X1 memiliki nilai T_{hitung} sebesar 2,326 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,027. Sedangkan t_{tabel} yang dilihat dari tabel signifikansi pada signifikansi $0,05/2= 0,025$ dengan derajat kebebasan $df=n-k-1$ atau $df=35-2-1=33$, maka hasil yang diperoleh untuk t_{tabel} adalah sebesar 2,037. Jadi, nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,326 > 2,037$) dan signifikansi $< 0,05$ ($0,027 < 0,05$) maka H_0 ditolak, artinya implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sedangkan, variabel X2 memiliki nilai T_{hitung} sebesar 4,946 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Sedangkan t_{tabel} yang dilihat dari tabel signifikansi pada signifikansi $0,05/2= 0,025$ dengan derajat kebebasan $df=n-k-1$ atau $df=35-2-1=33$, maka hasil yang diperoleh untuk t_{tabel} adalah sebesar 2,037. Jadi, nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,946 > 2,037$) dan signifikansi $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$) maka H_0 ditolak, artinya pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Uji F

Hasil Uji F dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6. Hasil Uji F
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	632.707	2	316.354	29.506	.000 ^b
Residual	343.094	32	10.722		
Total	975.801	34			

a. Predictors: (Constant), Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa f_{hitung} adalah sebesar 29,506 dengan tingkat signifikansi 0,000. Sedangkan f_{tabel} dengan derajat kebebasan $df=n-k-1$ atau $df=35-2-1=33$, maka hasil yang diperoleh untuk f_{tabel} adalah sebesar 3,285. Jadi, nilai $f_{hitung} > f_{tabel}$ ($29,506 > 3,285$) dan signifikansi $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$) maka H_0 ditolak, jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua dan pengawasan kualitas laporan keuangan secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil koefisien determinasi adalah:

Tabel 4.7. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.805 ^a	.648	.626

a. Predictors: (Constant), Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai R square (R^2) adalah sebesar 0,648 (64,8%) artinya mendekati 1. Ini berarti bahwa cukup kuat pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan 35,2% ($100\% - 64,8\%$) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

4. Metode Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4.8. Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	UC		SC	t	Sig.
	B	Std. e	Beta		
1 (Constant)	-.844	3.947		-.214	.832
X1	.508	.218	.288	2.326	.027
X2	.904	.183	.613	4.946	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dari tabel tersebut maka diperoleh persamaan regresi linear berganda, yaitu :

$$Y = -0,844 + 0,508 X_1 + 0,904 X_2 + e$$

Pada persamaan tersebut dapat diartikan bahwa, nilai konstanta bernilai negatif, yakni -0,844 berarti implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, pengawasan kualitas laporan keuangan, nilainya adalah sebesar 0, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah nilainya adalah -0,844.

Nilai koefisien regresi variabel X_1 bernilai positif yaitu 0,508 berarti bahwa setiap peningkatan pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebesar 1%, maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,508 atau 50,8%. Nilai koefisien regresi variabel X_2 bernilai positif yaitu 0,904 berarti bahwa setiap peningkatan pengawasan kualitas laporan keuangan sebesar 1%, maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,904 atau 90,4%.

5. Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis maka dapat dibuat pembahasan sebagai berikut:

a. Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang berarti apabila implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meningkat, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga akan meningkat, hal ini dapat diketahui pada tabel 4.5. dimana nilai signifikansi $0,027 <$ dari alpha $0,05$ dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($2,326 > 2,037$).

b. Pengaruh Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang berarti apabila pengawasan kualitas laporan keuangan di Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meningkat, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga akan meningkat, hal ini dapat diketahui pada tabel 4.5. dimana nilai signifikansi $0,000 <$ dari alpha $0,05$ dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($4,946 > 2,037$).

c. Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel independen implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan pengawasan kualitas laporan keuangan

secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, hal ini dapat diketahui pada tabel 4.6. dimana besaran nilai F hitung (29,506) lebih besar dari F tabel (3,285) dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis secara parsial implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
2. Berdasarkan hasil analisis secara simultan implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

B. Saran

1. Peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas sampel dan populasi penelitian yang tidak hanya terbatas pada lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara saja tetapi harus memperluas sampel dan populasi penelitian menjadi lingkup gabungan keseluruhan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat bahkan lintas negara sehingga cakupan hasil penelitian menjadi lebih luas dan dapat lebih digeneralisasi.
2. Untuk menghindari terjadinya perbedaan persepsi atas pernyataan dalam instrumen penelitian yang diberikan kepada responden maka perlu dilakukan penjelasan awal terlebih dahulu atas maksud dan tujuan pertanyaan sehingga hasil penelitian akan menjadi lebih baik lagi.
3. Penelitian ini perlu dikembangkan lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dengan menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti kejelasan sasaran anggaran, penganggaran berbasis kinerja, pemanfaatan teknologi informasi, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi. 2014. *SPSS 22 Pengolahan Data Terpraktis*. Duwi Priyatno. Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. Edisi Revisi. Rineka Cipta. Jakarta.
- Bastian, Indra. 2007. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Erlangga. Jakarta.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Kusumah, AA. 2012. “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”. *Jurnal Akuntansi Vol. 4, No.2. Hal. 32-33*.
- Lasoma, VA. 2011. “Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. *Jurnal Akuntansi Vol. 3, No.1. Hal. 32-33*.
- Nasution, D. A. D. 2016. “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi SAP Berbasis Akrua dengan Komitmen SKPD sebagai Variabel Moderating pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara”. *Jurnal Ekonom Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara*. Medan.
- Nordiawan, Deddy. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Nordiawan, Deddy. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Pamungkas. 2012. “Pengaruh Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”. *Jurnal Ilmiah Ranggagading Volume 12 Nomor 2 (Oktober 2012) hal 82-93*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Prasetyo, Bambang dan Jannah LM. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Puriyatno, Duwi. 2014. *SPSS 22 Pengolahan Data Terpraktis*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Riahi, Ahmad dan Belkaoui. 2006. *Accounting Theori*. Edisi 1. Salemba Empat. Jakarta.
- Riantiaro, R dan Azlina N. 2011. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”. *Jurnal Akuntansi Vol. 2, No. 3. Hal. 32-33*.
- Rosjidi. 2001. *Akuntansi Sektor Publik Pemerintah : Kerangka, Standard dan Metode*. Aksara Satu. Surabaya.
- Santosa, Urip. 2008. “Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”. *Jurnal Akuntansi*.
- Subaweh, I dan Nugraheni P. 2008. “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”. *Jurnal Akuntansi Vol.13, No. 1. Hal. 32-33*.
- Sugiyono. 2007. *Statistik untuk Penelitian*. CV Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
<http://www.sumutprov.go.id>.